

## Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Kota Depok Pada Tahun 2016-2020 (Studi Kasus di Kantor Samsat Cinere)

**Jwenty Binsar Sihombing<sup>1</sup>, Marthinus Ismail<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Advent Indonesia

E-mail: jwentybinsar12@gmail.com<sup>1</sup>, marthin\_smile@unai.edu<sup>2</sup>

---

### Article History:

Received: 10 Januari 2022

Revised: 18 Januari 2022

Accepted: 18 Januari 2022

### Kata Kunci: Pajak

*Kendaraan Bermotor, Tarif  
Pajak Progresif, Undang-  
Undang Pajak Progresif*

***Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari dasar-dasar tarif pengenaan pajak progresif atas kendaraan bermotor di kota Depok, Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa : wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengenaan tarif pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan.*

---

## PENDAHULUAN

Pajak progresif adalah biaya pajak yang harus dibayar bila memiliki kendaraan baik motor atau mobil atau yang lain yang memiliki kesamaan nama pemilik dan alamat tempat tinggal. Pajak progresif kendaraan bermotor ini dapat diharapkan untuk menekan jumlah kendaraan bermotor serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. Semakin besar nilai nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak maka semakin meningkatkan pula pemasukan dari pendapatan daerah itu sendiri (Irfan,2016). Banyak diantara kita kurang mengerti tentang penerapan pajak progresif kendaraan bermotor. Sebenarnya dasar pengenaan pajak progresif dari berapa banyak kendaraan yang dimiliki dalam satu nama pemilik dan alamat tempat tinggal sehingga dikenakan tarif pajak progresif yang lebih besar dari sebelumnya.

Pajak progresif adalah pajak tambahan yang dibayarkan wajib pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya dari wajib pajak tersebut (Jawapos,10 des 2017). berdasarkan peraturan tersebut, jika terjadi transaksi jual beli kendaraan bermotor seperti mobil, maka pihak pembeli kendaraan bekas wajib melakukan kegiatan bea balik nama terhadap kendaraan yang dibeli tersebut.

Dengan adanya penerapan pajak progresif akan meningkatkan beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya. Pemilik kendaraan pribadi wajib membayar pajak lebih mahal untuk setiap jumlah kendaraan yang dimilikinya. Meningkatnya beban pajak akan membuat bertambahnya pendapatan pajak setiap daerah. Namun masih banyak yang belum mengerti tentang pajak progresif terhadap orang wajib pajak. Ini yang menyebabkan permasalahan bagi masyarakat saat akan membayar pajak kendaraan nya. Mereka harus membayar lebih besar dari pajak sebelumnya.

---

**Tabel 1. Data Jumlah Kendaraan Bermotor Samsat Cinere**

Bulan	Jumlah (Unit)	
	2019	2020
Januari	392.700	401.052
Februari	393.489	389.330
Maret	394.609	390.005
April	394.983	389.612
Mei	395.957	388.280
Juni	396.080	387.343
Juli	397.127	379.672
Agustus	396.358	379.258
September	386.563	378.981
Oktober	387.345	376.084
November	399.027	375.735
Desember	400.026	374.199

Sumber : SAMSAT Cinere 2020

Dari data tabel diatas dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor tiap Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2019 total keseluruhan kendaraan bermotor dari Januari sampai Desember 4.734.264 dan pada Tahun 2020 total keseluruhan kendaraan bermotor dari Januari sampai Desember 4.609.551. Ketika Saya melihat Kendaraan yang saya miliki sudah sewajibnya membayar pajak, oleh karena kendaraan yang saya miliki terkena pajak progresif. Dengan adanya pajak progresif, belum dapat dipastikan apakah pajak progresif meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan mengatur pajak dalam kepemilikan kendaraan bermotor.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pajak progresif**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (2016) pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pajak progresif memiliki pengertian yaitu pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan bermotor (Sari, Burhan & Putra, 2018). Pajak progresif mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2011 berbasis kartu keluarga (KK) namun pajak progresif yang mengacu pada Perda Nomor 8 tahun 2016 kini bersifat agak fleksibel karna sekarang bersandar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya pajak progresif ini berfungsi mengatur kepemilikan kendaraan roda dua (2), empat (4) atau lebih dari yang kedua atau seterusnya kendaraan.

### **Syarat pemungutan pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:6) :

- 1) Diharuskan adil
- 2) Mendasari perundang-undangan
- 3) Tidak terkait dengan unsur ekonomi
- 4) Tidak melebihi biaya pungut
- 5) Sederhana

### **Fungsi pajak**

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya

menurut Diaz Priantara (2017) :

- 1) Sebagai fungsi anggaran (budgetair)
- 2) Sebagai fungsi mengatur (regulerend)
- 3) Sebagai fungsi stabilitas
- 4) Sebagai fungsi redistribusi pendapatan

### **Teori yang mengatur pemungutan pajak**

Teori yang mengatur pemungutan pajak menjelaskan hak kepada Negara untuk pemungutan pajak Menurut Diaz Priantara (2017) :

- 1) Teori asuransi
- 2) Teori kepentingan
- 3) Teori daya pikul
- 4) Teori Bakti
- 5) Teori asas daya beli

### **Sistem pemungutan pajak**

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh waluyo (2020) dibagi 3 :

1. Official Assessment System  
Merupakan sistim pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
2. Self Assesement System  
Merupakan sistim pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Witholding system  
Merupakan sistim pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong, memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **Tarif pajak kendaraan bermotor**

Menurut Mardiasmo (2018) tarif kendaraan bermotor adalah :

1. 1,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan badan.
2. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
3. 0,5% untuk kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan dan instansi pemerintah.

### **Pajak kendaraan bermotor**

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua (2) atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang cara perpajakan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut: Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak.

### **Dasar pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No 68 Tahun 2011 tentang pajak daerah**

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No 68 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

dalam pasal 8 angka (1) dasar pengenaan PKB adalah :

- a. Untuk kepemilikan kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,75%.
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4, roda 2 dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
  - 1) PKB kepemilikan ke 2 sebesar 2,25%

2) PKB kepemilikan ke 3 sebesar	2,75%
3) PKB kepemilikan ke 4 sebesar	3,25%
4) PKB kepemilikan ke 5 dan seterusnya	3,75%

### **Penelitian terdahulu**

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini berikut dicantumkan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Nugraha pada Tahun 2012 dengan judul penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Hasil penelitian tersebut banyak masyarakat menjual kendaraan namun belum melakukan balik nama, apabila dia ingin membeli kendaraan baru akan dikenakan Pajak Progresif.

Penelitian yang dilakukan Adi pada Tahun 2012 dengan judul Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Surakarta. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa belum dipisahkannya subjek dan objek pajak progresif sehingga belum dapat diketahui jumlah penerimaan dari pajak progresif.

Penelitian yang dilakukan Rudi Irwanto pada tahun 2015 yang berjudul Analisis Penerapan Pajak terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus Samsat Kota Makassar). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya pajak progresif, persentase kendaraan menurun.

Penelitian yang dilakukan Muammar Khaddafi, Annesa Dianty Darwin tahun 2018 yang berjudul Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor THE FOUR MAXIM (studi kasus SAMSAT Kab. Pasamaan Barat Provinsi Sumatra Barat). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak tiap tahun nya mengalami peningkatan.

### **Konsep Kerangka Pemikiran**

Dengan uraian penelitian dan latar belakang masalah diatas peneliti menetapkan konsep kerangka pemikiran sebagai hubungan dengan penelitian ini, yaitu Variabel (X) adalah Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif dan Variabel (Y) adalah Pajak Kendaraan Bermotor.



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang sifatnya deskriptif, yaitu dengan prosedur pemecahan masalah dengan cara memperlihatkan semua data yang didapatkan dari hasil observasi atau penelitian kemudian dilakukan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2020:4) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

### **Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini di kantor Samsat Cinere, karna di kantor Samsat ini menerima dan melayani administrasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor untuk wilayah Kota Depok dan sudah melakukan penerapan tarif pajak progresif.

### **Prosedur Penelitian**

Susunan prosedur penelitian berdasarkan yang dilakukan di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan penelitian kepada Fakultas Ekonomi untuk melakukan penelitian pada data-data yang akan digunakan dalam penyusunan Jurnal.
2. Melakukan observasi langsung ke lokasi objek untuk mengumpulkan data-data dan mengetahui mekanisme pemungutan pajak progresif.
3. Meminta izin kepada Ibu Rina selaku pimpinan Samsat Cinere dan di dalam penelitian dan pengumpulan data.
4. Mengumpulkan data yang diperlukan terkait penelitian.
5. Menganalisis apakah pengenaan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak.
6. Memberikan kesimpulan atas hasil dari penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi kepustakaan  
Pengumpulan data dengan cara melihat dan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Penelitian lapangan  
Kegiatan kunjungan serta kegiatan pengumpulan data ditempat yang memiliki sumber data yang pasti dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang diperoleh dengan cara :
  - a. Dokumentasi
  - b. Wawancara

### **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian, metode yang digunakan adalah Deskriptif Analisis menurut Sugiyono (2020) yaitu metode yang digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu kondisi, sistem pemikiran suatu peristiwa pada masa sekarang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian mengenai SAMSAT CINERE**

Pengumpulan pajak kendaraan bermotor pada satu kantor atau cabang disebut Samsat. Samsat Cinere berfungsi untuk mengurus biaya administrasi kendaraan bermotor yang berada di Jl. Limo Raya no 60, Limo, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16512.

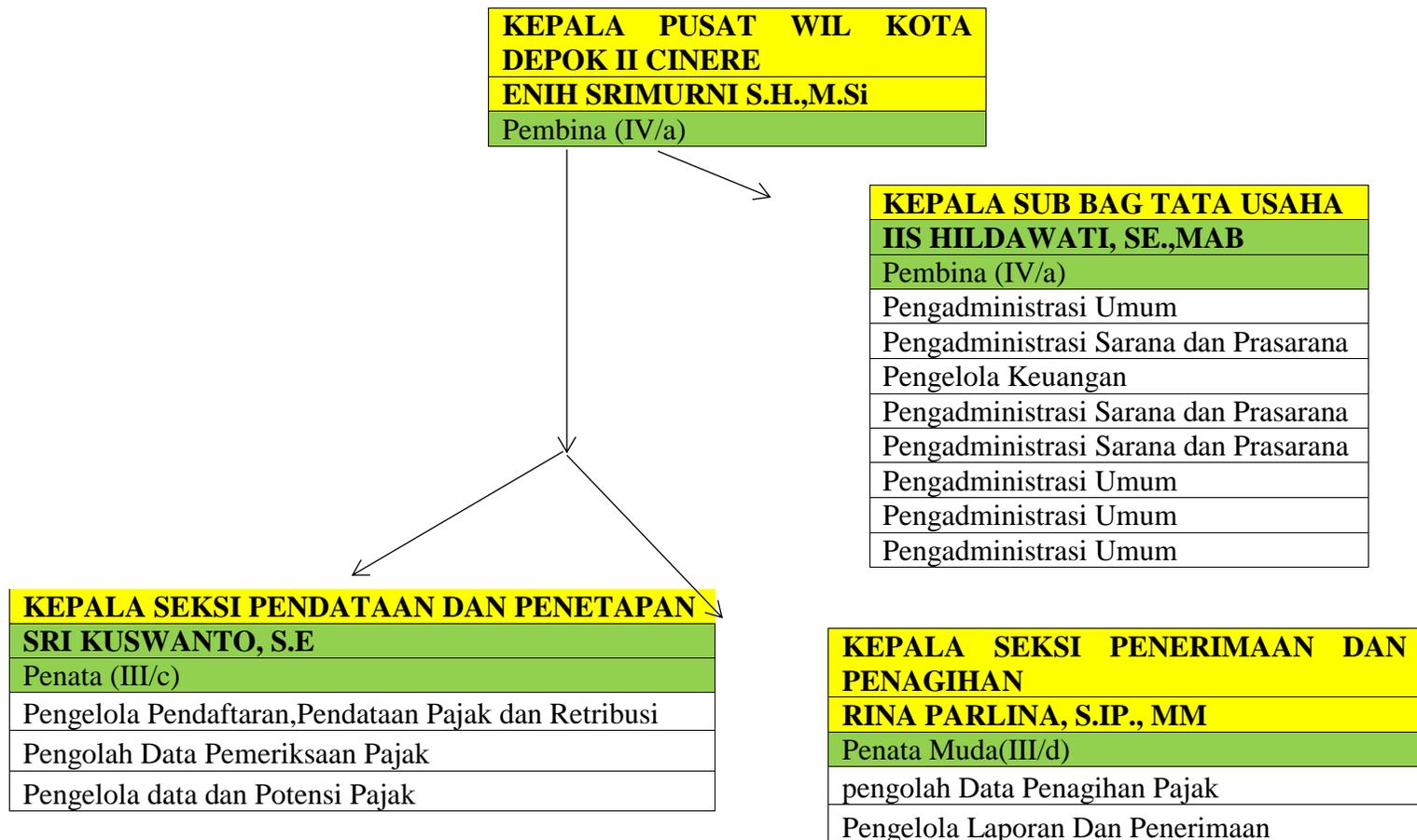
### **Visi Samsat Cinere :**

“ Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua “

### **Misi Samsat Cinere :**

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
  2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
  3. Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan aparatur partisipasi publik.
  4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.
  5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olahraga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.
-

**Struktur Organisasi**



**Gambar 2. Struktur Organisasi**

**Hasil Penelitian**

Penentuan untuk pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan target dan realisasi.

**Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Cinere**

**Tabel 2. Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Cinere**

No	Bulan	PKB		BBNKB	
		2019	2020	2019	2020
1	Januari	204.516.000.000	328.201.000.000	170.387.000.000	167.856.000.000
2	Februari	204.516.000.000	328.201.000.000	170.387.000.000	167.856.000.000
3	Maret	204.516.000.000	328.201.000.000	170.387.000.000	167.856.000.000
4	April	204.516.000.000	328.201.000.000	168.975.000.000	167.856.000.000
5	Mei	204.516.000.000	270.940.374.500	168.975.000.000	115.956.000.000
6	Juni	204.516.000.000	270.940.374.500	168.975.000.000	115.956.000.000
7	Juli	204.516.000.000	270.940.374.500	168.975.000.000	112.913.000.000
8	Agustus	204.516.000.000	270.940.374.500	168.975.000.000	112.913.000.000
9	September	227.869.000.000	270.940.374.500	168.975.000.000	112.913.000.000
10	Oktober	227.869.000.000	270.940.374.500	168.975.000.000	112.913.000.000

11	November	227.869.000.000	270.940.374.500	168.975.000.000	112.913.000.000
12	Desember	227.869.000.000	284.827.206.500	168.975.000.000	112.913.000.000

Sumber : Samsat Cinere

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa target penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai Agustus 204.516.000.000 dan meningkat dari bulan September sampai Desember menjadi 227.869.000.000 dan target penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai April menetap dan mulai dari bulan Mei sampai November terlihat menurun menjadi 270.940.374.500 dan pada bulan Desember naik menjadi 284.827.206.500. Dari Tabel 2 tersebut saya mengambil datanya di Kantor Samsat Cinere dengan kode DPD. B.

**Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Cinere**

No	Bulan	Realisasi		BBNKB	
		2019	2020	2019	2020
1	Januari	21.924.628.500	19.911.862.800	14.979.610.000	13.853.252.500
2	Februari	38.273.579.800	38.141.327.800	26.617.100.000	29.301.347.500
3	Maret	57.597.075.600	56.503.880.200	40.044.100.000	43.502.285.000
4	April	72.917.692.600	68.394.286.500	52.246.882.500	51.245.185.000
5	Mei	95.053.831.900	81.829.813.200	70.481.210.000	54.144.097.500
6	Juni	107.980.383.700	99.814.182.500	81.171.177.500	58.761.632.500
7	Juli	129.437.520.600	121.097.465.000	99.297.637.500	67.236.572.500
8	Agustus	149.140.941.100	137.682.526.200	113.383.195.000	73.453.786.100
9	September	168.469.477.400	156.671.206.600	127.489.797.500	81.163.458.000
10	Oktober	188.142.796.900	174.354.293.400	141.373.320.000	86.446.005.700
11	November	209.676.010.600	194.159.615.600	155.359.795.000	93.664.010.500
12	Desember	233.703.106.200	216.778.018.900	171.386.340.000	102.808.880.700

Sumber : Samsat Cinere

Dari Tabel 3 realisasi penerimaan PKB terlihat bahwa pada tahun 2019 bulan Januari yang terealisasi 21.924.628.500 sampai Desember 233.703.106.200 semakin meningkat tiap bulannya dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PKB pada bulan Januari yang terealisasi 19.911.862.800 sampai Desember 216.778.018.900 terus meningkat. Dari data tersebut bisa diartikan bahwa pajak yang terealisasi pada tahun 2019 dan 2020 meningkat. Data tersebut diambil dari Kantor Samsat Cinere dengan kode DPD.B.

**Tabel 4. PKB Realisasi Penerimaan, Penyetoran PKB Tahun 2019**

Tahun 2019	Jenis PKB				
	PKB 1	PKB 2	PKB 3	PKB 4	PKB 5
Januari	16.703.916.600	3.223.335.500	744.560.600	132.685.200	63.275.900
Februari	12.265.963.100	2.579.867.400	602.440.300	147.224.300	83.314.800
Maret	14.715.354.100	2.991.637.900	736.825.900	67.488.600	104.847.700
April	12.482.087.100	2.542.677.300	553.270.700	115.100.600	95.130.600
Mei	16.328.484.500	3.090.508.400	643.642.100	189.918.700	130.584.700
Juni	10.176.909.400	1.798.956.700	395.830.800	48.555.449	45.670.600
Juli	16.383.093.700	3.601.322.200	593.890.600	129.671.900	81.406.400
Agustus	15.285.539.200	3.059.657.400	663.349.300	183.221.700	86.050.400
September	14.780.323.100	3.108.559.100	678.032.400	147.886.500	73.610.000
Oktober	15.188.656.400	2.811.903.000	636.012.700	124.906.600	112.032.300
November	16.005.375.600	3.219.004.100	651.027.800	117.419.000	60.455.300
Desember	18.923.564.600	3.627.792.400	792.920.100	122.934.800	71.910.400

Sumber : Samsat Cinere

Sesuai dengan judul yang peneliti tuliskan Tabel 6 merupakan Jenis Pendapatan Daerah dari hasil Pajak Progresif. Tabel 6 menjelaskan pada Tahun 2019. PKB 1 artinya Pajak Kendaraan Bermotor dalam satu nama pemilik kendaraan pertama. Jumlah yang ditampilkan di Tabel diatas berdasarkan data Samsat Cinere dari data lokal kendaraan dan online roda 4 dengan data lokal dan online kendaraan roda 2. PKB 2 sampai PKB 5 yang terkena Pajak Progresif yang dimana dalam satu nama pemilik memiliki 2 atau lebih kendaraannya. Untuk mendapatkan hasil yang terealisasi maka jumlahkan PKB 1,2,3,4 dan 5. Tahun 2019 dari bulan Januari sampai Desember PKB 1 berjumlah 179.239.267.400, PKB 2 berjumlah 35.655.221.400, PKB 3 berjumlah 7.691.803.300, PKB 4 berjumlah 1.527.013.349, PKB 5 berjumlah 1.008.289.100 jadi total keseluruhan PKB 225.121.594.549. Kendaraan yang tidak terkena progresif (PKB 1) dari bulan Januari sampai dengan Desember berjumlah 179.239.267.400 dan yang terkena progresif berjumlah 45.882.327.149.

**Tabel 5. PKB Realisasi Penerimaan, Penyetoran PKB Tahun 2020**

Tahun 2020	Jenis PKB				
	PKB 1	PKB 2	PKB 3	PKB 4	PKB 5
Januari	15.602.505.500	3.004.572.500	687.058.200	132.107.900	58.877.900
Februari	13.629.712.800	2.854.833.800	622.060.200	165.330.400	255.840.300
Maret	13.511.041.700	2.829.458.200	659.188.100	115.170.500	284.461.100
April	9.084.711.500	1.789.921.800	345.055.000	67.700.000	193.915.900
Mei	10.712.823.100	1.908.470.800	285.444.000	43.972.500	161.951.500
Juni	14.095.429.600	2.462.646.000	501.224.000	80.831.300	314.939.900
Juli	15.438.506.600	2.812.057.100	576.967.300	90.045.300	209.291.200
Agustus	14.021.748.800	2.547.178.800	538.125.700	200.562.600	324.143.000
September	14.901.501.200	2.614.889.400	512.325.100	89.498.500	239.518.500
Oktober	13.856.663.800	2.299.601.000	489.277.500	85.411.200	273.307.500
November	15.274.174.600	2.653.157.800	491.592.100	113.060.600	296.058.000
Desember	17.660.813.500	3.076.547.900	456.806.400	71.342.300	286.722.600

Sumber : Samsat Cinere

Sesuai dengan judul yang peneliti tuliskan Tabel 7 merupakan Jenis Pendapatan Daerah dari hasil Pajak Progresif. Tabel 7 menjelaskan pada Tahun 2020. PKB 1 artinya Pajak Kendaraan Bermotor dalam satu nama pemilik kendaraan pertama. Jumlah yang ditampilkan di Tabel diatas berdasarkan data Samsat Cinere dari data lokal kendaraan dan online roda 4 dengan data lokal dan online kendaraan roda 2. PKB 2 sampai PKB 5 yang terkena Pajak Progresif yang dimana dalam satu nama pemilik memiliki 2 atau lebih kendaraan nya. Untuk dapat mengetahui realisasi dari keseluruhan PKB maka perlu dijumlahkan PKB 1,2,3,4 dan 5. Tahun 2020 yang terealisasi pada bulan Januari sampai Desember PKB 1 berjumlah 167.789.632.700, PKB 2 berjumlah 30.853.335.100, PKB 3 berjumlah 6.165.123.600, PKB 4 1.255.033.100, PKB 5 berjumlah 2.899.027.400. Untuk total keseluruhan PKB berjumlah 208.962.151.900. Untuk kendaraan yang tidak terkena progresif (PKB 1) berjumlah 167.789.632.700 dan yang terkena progresif berjumlah 41.172.519.200. Kita dapat membandingkan perbedaan PKB tahun 2019 dan 2020. PKB 1 tahun 2019 berjumlah 179.239.267.400 dan PKB 1 tahun 2020 berjumlah 167.789.632.700 yang artinya mengalami penurunan PKB 1 dari tahun 2019 ke 2020. PKB total progresif tahun 2019 berjumlah 45.882.327.149 dan tahun 2020 berjumlah 41.172.519.200 yang artinya mengalami penurunan terhadap pajak progresif dari tahun 2019 ke 2020.

**Tabel 6. Pencapaian PKB 1,2,3,4 dan 5 berdasarkan berapa %**

Tahun 2019	PKB 1	PKB 2	PKB 3	PKB 4	PKB 5	Total Keseluruhan
	179.239.267. 400	35.655.221. 400	7.691.803.3 00	1.527.013.3 49	1.008.289.1 00	225.121.594. 549
Target %	79,62%	15,84%	3,42%	0,68%	0,45%	45.882.327.1 49
						20,38%

Berdasarkan dari table ke 4 pada Tahun 2019 kita uraikan bahwa total keseluruhan PKB 225.121.594549 target pencapaian pada tahun 2019 mencapai 79,62% untuk PKB 1 khusus untuk yang tidak progresif dan untuk mencari kita mengetahui berapa % yang tercapai dari target tersebut yaitu :  $\frac{\text{total keseluruhan}}{\text{PKB 1}}$  . Target yang tercapai pada PKB 2 mecapai 15,84% rumusnya :  $\frac{\text{total keseluruhan}}{\text{PKB 2}}$  . Target Pencapaian PKB 3 mencapai 3,42% rumusnya :  $\frac{\text{total keseluruhan}}{\text{PKB 3}}$  . Target pencapaian PKB 4 mencapai 0,68% rumusnya :  $\frac{\text{total Keseluruhan}}{\text{PKB 4}}$  . Target pencapaian PKB 5 mencapai 0,45% dengan rumus :  $\frac{\text{total keseluruhan}}{\text{PKB 5}}$  . Dan total keseluruhan Pajak Progresif 45.882.327.149 total pencapaian pajak progresif mecapai 20,38%.

**Tabel 7. Pencapaian PKB 1,2,3,4 dan 5 berdasarkan berapa %**

Tahun 2020	PKB 1	PKB 2	PKB 3	PKB 4	PKB 5	Total Keseluruhan
	167.789.632. 700	30.853.335. 100	6.165.123.6 00	1.255.033.1 00	2.899.027.4 00	208.962.151. 900
Target %	80,30%	14,77%	2,95%	0,6%	1,39%	41.172.519.2 00
						19,70%

Data diatas ini merupakan hitungan dari data yang ada pada tabel 5. Target pencapaian PKB berdasarkan % tahun 2020 untuk PKB 1 mencapai 80,30% rumus menentukannya :  $\frac{\text{total keseluruhan}}{\text{PKB 1}}$  . Target pencapaian PKB 2 mencapai 14,77% rumus menentukannya :  $\frac{\text{total keseluruhan}}{\text{PKB 2}}$  . Target pencapaian PKB 3 mencapai 2,95% rumus menentukannya :  $\frac{\text{total keseluruhan}}{\text{PKB 3}}$  . Target pencapaian PKB 4 mencapai 0,6% rumus menentukannya :  $\frac{\text{total Keseluruhan}}{\text{PKB 4}}$  . Target pencapaian PKB 5 mencapai 1,39% rumus menentukannya :  $\frac{\text{total keseluruhan}}{\text{PKB 5}}$  . Total keseluruhan pajak progresif 41.172.519.200 total pencapaiannya berdasarkan % 19,70%. Perbandingan PKB 1 tahun 2019 dengan PKB 1 tahun 2020 mengalami penurunan -6,39%. Perbandingan PKB 2 tahun 2019 dengan PKB 2 tahun 2020 mengalami penurunan -13,47%. Perbandingan PKB 3 tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan -19,85%. Perbandingan PKB 4 tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sedikit -17,81%. Dan untuk PKB 5 mengalami kenaikan yang sangat luar biasa dari tahun 2019 sampai 2020 mencapai 187,52%. Penurunan PKB pada tahun 2020 mungkin saja pengaruh dari adanya Pandemi Covid-19 sehingga pendapatan daerah khususnya Cinere mengalami penurunan.

**Tabel 8. Perbandingan PKB 1,2,3,4 dan 5 Tahun 2019 & 2020**

Tahun	PKB 1	SKPD	PKB 2	SKPD	PKB 3	SKPD	PKB 4	SKPD	PKB 5	SKPD	Sanksi Adm	SKPD	Total	Total SKPD
Jan	16.70 3.916. 600	18 .1 69	3.223 .335. 500	4. 16 2	744. 560. 600	88 8	132. 685. 200	14 4	63.2 75.9 00	80	1.186 .374. 400	8. 31 0	22.05 4.148. 200	31 .7 53
Feb	12.26 5.963. 100	14 .4 24	2.579 .867. 400	3. 27 5	602. 440. 300	66 5	147. 224. 300	16 4	83.3 14.8 00	92	841.0 84.90 0	6. 81 8	16.51 9.894. 800	25 .4 38
Mar	14.71 5.354. 100	16 .2 60	2.991 .637. 900	3. 67 3	736. 825. 900	75 2	67.4 88.6 00	11 8	104. 847. 700	69	967.7 84.70 0	6. 95 1	19.58 3.938. 900	27 .9 13
Apr	12.48 2.087. 100	14 .6 35	2.542 .677. 300	3. 29 1	553. 270. 700	65 8	115. 100. 600	13 1	95.1 30.6 00	66	689.4 86.50 0	5. 82 2	16.47 7.752. 800	24 .6 03
Mei	16.32 8.484. 500	17 .0 44	3.090 .508. 400	3. 85 9	643. 642. 100	79 6	189. 918. 700	15 9	130. 584. 700	90	833.8 71.70 0	6. 60 3	21.21 7.010. 100	28 .5 51
Jun	10.17 6.909. 400	12 .4 33	1.798 .956. 700	2. 72 8	395. 830. 800	53 0	48.5 55.4 49	10 7	45.6 70.6 00	47	561.8 49.50 0	5. 85 4	13.02 7.772. 449	21 .6 69
Juli	16.38 3.093. 700	19 .5 65	3.601 .322. 200	4. 63 5	593. 890. 600	85 6	129. 671. 900	15 7	81.4 06.4 00	94	938.8 07.55 0	8. 28 4	21.72 8.192. 350	33 .5 91
Agus	15.28 5.539. 200	19 .2 76	3.059 .657. 400	4. 55 9	663. 349. 300	87 5	183. 221. 700	18 2	86.0 50.4 00	97	854.6 58.70 0	8. 08 0	20.13 2.476. 700	33 .0 69
Sept	14.78 0.323. 100	18 .1 90	3.108 .559. 100	4. 24 0	678. 032. 400	84 4	147. 886. 500	19 3	73.6 10.0 00	76	846.6 86.40 0	7. 88 8	19.63 5.097. 500	31 .4 31
Ok	15.18 8.656. 400	18 .6 84	2.811 .903. 000	4. 26 9	636. 012. 700	86 2	124. 906. 600	19 4	112. 032. 300	91	853.6 64.60 0	7. 84 2	19.72 7.175. 600	31 .9 42
Nov	16.00 5.375. 600	18 .2 14	3.219 .004. 100	4. 34 6	651. 027. 800	86 5	117. 419. 000	16 9	60.4 55.3 00	70	201.3 66.10 0	2. 10 5	20.25 4.647. 900	25 .7 69
Des	18.92 3.564. 600	20 .0 71	3.627 .792. 400	4. 43 9	792. 920. 100	89 5	122. 934. 800	15 7	71.9 10.4 00	90	95.00 0	1	23.53 9.217. 300	25 .6 53

Tahun 2020	PKB 1	SKPD	PKB 2	SKPD	PKB 3	SKPD	PKB 4	SKPD	PKB 5	SKPD	Sanksi Adm	SKPD	Total	Total SKPD
Jan	15.602 .505.5 00	17 .4 87	3.004 .572. 500	3. 95 5	687. 058. 200	82 3	132. 107. 900	16 9	58.8 77.9 00	78	704. 060. 400	6. 70 3	20.18 9.182. 400	29 .2 15
Feb	13.629 .712.8 00	15 .3 11	2.854 .833. 800	3. 56 5	622. 060. 200	74 8	165. 330. 400	18 5	25.5 840. 300	15 3	666. 860. 600	6. 53 1	18.19 4.638. 100	26 .4 93
Mar	13.511 .041.7 00	14 .1 95	2.829 .458. 200	3. 48 3	659. 188. 100	78 1	11.5 170. 500	14 3	284. 461. 100	13 6	6.08 7.80 0	12	17.40 5.407. 400	19 .4 70
April	9.084. 711.50 0	8. 91 0	1.789 .921. 800	2. 08 0	345. 055. 000	43 2	67.7 00.0 00	84	193. 915. 900	82	5.83 8.90 0	11	11.48 7.143. 100	11 .5 99
Mei	10.712 .823.1 00	10 .3 83	1.908 .470. 800	2. 13 2	285. 444. 000	38 1	43.9 72.5 00	77	161. 951. 500	81	2.02 5.60 0	1	13.11 4.687. 500	13 .0 55
Juni	14.095 .429.6 00	15 .9 08	2.462 .646. 000	3. 43 3	501. 224. 000	59 3	80.8 31.3 00	12 5	314. 939. 900	11 2	5.87 5.20 0	8	17.46 0.946. 000	20 .1 79
Juli	15.438 .506.6 00	17 .5 75	2.812 .057. 100	3. 68 0	576. 967. 300	68 7	90.0 45.3 00	12 1	209. 291. 200	14 1	5.55 6.10 0	7	19.13 2.423. 600	22 .2 11
Agustus	14. 021.74 8.800	17 .2 33	2.547 .178. 800	3. 80 3	538. 125. 700	69 3	200. 562. 600	12 0	324. 143. 000	14 3	3.53 5.60 0	3	17.63 5.294. 500	21 .9 95
Sept	14.901 .501.2 00	16 .9 67	2.614 .889. 400	3. 61 1	512. 325. 100	68 5	89.4 98.5 00	12 3	23.9 518. 500	13 3	3.50 9.40 0	5	18.36 1.242. 100	21 .5 24
Oktober	13.856 .663.8 00	15 .4 74	2.299 .601. 000	3. 27 0	489. 277. 500	59 9	85.4 11.2 00	11 3	273. 307. 500	12 9	2.18 4.50 0	3	17.00 6.445. 500	19 .5 88
Nov	15.274 .174.6 00	16 .9 25	2.653 .157. 800	3. 63 6	491. 592. 100	70 3	113. 060. 600	12 7	296. 058. 000	12 6	361. 700	4	18.82 8.404. 800	21 .5 21
Des	17. 66 0.813. 500	17 .8 87	3.076 .547. 900	3. 73 6	456. 806. 400	63 9	71.3 42.3 00	10 9	286. 722. 600	16 2	184. 562. 800	1. 68 9	21.73 6.795. 500	24 .2 22

Tabel yang ada diatas merupakan perbandingan antara data PKB 1,2,3,4 dan 5 beserta sanksi administrasi tahun 2019 & 2020. Kita bisa melihat dan memahami total SKPD tahun 2019 dan tahun 2020 pada bulan Januari mengalami penurunan sebesar 7,99% dan jumlah pengenaannya

berdasarkan rupiah mengalami penurunan sebesar 8,46%. Pada bulan Februari perbandingan tahun 2019 & 2020 total SKPD mengalami peningkatan sebesar 4,15% dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah mengalami peningkatan sebesar 10,14%. Bulan Maret perbandingan tahun 2019 & 2020 total SKPD mengalami penurunan yang bisa di kategorikan lumayan sebesar 30,25% dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah mengalami penurunan sebesar 11,12%. Adapun penyebab yang membuat penurunan pada Bulan Maret disebabkan karena awal masuknya Covid-19 masuk ke Indonesia pada tahun 2020 sehingga terganggu nya perekonomian. Bulan April perbandingan tahun 2019 & 2020 total SKPD mengalami penurunan yang melebihi dari bulan Maret yaitu sebesar 52,86% dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 38,19%. Pada bulan April juga mengalami penurunan kita bisa melihat dimana total SKPD tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2020, karna adanya kebijakan Pemerintah yaitu PSBB untuk mencegah masuk virus Covid-19 sehingga pada bulan April berdampak terganggu nya pendapatan daerah khususnya di Samsat Cinere. Bulan Mei perbandingan antara tahun 2019 & 2020 total SKPD mengalami penurunan sebesar 54,27% dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah mengalami penurunan sebesar 38,19%. Pada bulan Juni perbandingan antara 2019 & 2020 total SKPD mengalami penurunan sebesar 7% dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah nya mengalami peningkatan sebesar 34,03%. Adapun total SKPD menurun itu akibat perbandingan yg sedikit antara tahun 2019 ke tahun 2020 dan jumlah rupiahnya mengalami peningkatan meskipun masih di dalam situasi pandemi Pemerintah kembali membuat aturan New Normal. Bulan Juli perbandingan antara tahun 2019 & tahun 2020 total SKPD mengalami penurunan sebesar 33,83% dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah mengalami penurunan sebesar 11,95%. Penurunan yang disebabkan karena total SKPD tahun 2019 lebih besar daripada tahun 2020 dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah nya tahun 2019 lebih besar daripada tahun 2020 karena Pemerintah kembali membuat aturan PSBB. Pada bulan Agustus perbandingan antara tahun 2019 & tahun 2020 total SKPD mengalami penurunan sebesar 33,49% dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah nya mengalami penurunan sebesar 12,4%. Pada bulan September perbandingan antara tahun 2019 & tahun 2020 total SKPD mengalami penurunan sebesar 31,52% dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah mengalami penurunan sebesar 6,49%. Pada Bulan Oktober perbandingan antara tahun 2019 & tahun 2020 total SKPD mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 38,68% dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah mengalami penurunan sebesar 13,79%. Bulan November perbandingan antara tahun 2019 & tahun 2020 total SKPD mengalami penurunan 16,48% dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah mengalami penurunan sebesar 7,04%. Bulan November tahun 2020 meskipun dalam keadaan pandemi tapi untuk penurunannya tidak jauh. Di bulan Desember perbandingan tahun 2019 & tahun 2020 total SKPD mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh karena pada tahun 2019 total SKPD lebih besar sedikit dibandingkan dengan tahun 2020 sehingga mengalami penurunan sebesar 5,58% dan jumlah pengenaan berdasarkan rupiah mengalami penurunan sebesar 7,66%.

**Tabel 9. Realisasi Denda Pajak Kendaraan Bermotor**

Tahun	PKB	Total denda
Januari 2019	8.310	1.186.374.400
Februari 2019	6.818	841.084.900
Maret 2019	6.951	967.784.700
April 2019	5.822	689.486.500
Mei 2019	6.603	833.871.700
Juni 2019	5.854	561.849.500
Juli 2019	8.284	938.807.550

---

Agustus 2019	8.080	854.658.700
September 2019	7.888	846.686.400
Oktober 2019	7.842	853.664.600
November 2019	2.105	201.366.100
Desember 2019	1	95.000

Sumber : Samsat Cinere

Tabel 9 menjelaskan realisasi denda PKB dengan jumlah kendaraan yang telat bayar berdasarkan denda pajaknya. Dari Tabel realisasi denda pajak diatas dijelaskan denda pajak naik dan turun bersumber dari Samsat Cinere. Total denda nya berdasarkan dari PKB 1,2,3,4 dan 5 dari data lokal dan online kendaraan roda 2 dan roda 4.

**Tabel 10. Realisasi Denda Pajak Kendaraan Bermotor**

Tahun	PKB	Total denda
Januari 2020	6.703	704.060.400
Februari 2020	6.531	666.860.600
Maret 2020	12	6.087.800
April 2020	11	5.838.900
Mei 2020	1	2.025.600
Juni 2020	8	5.875.800
Juli 2020	7	5.555.400
Agustus 2020	3	3.535.600
September 2020	5	3.509.400
Oktober 2020	3	2.184.500
November 2020	4	361.700
Desember 2020	1.689	184.562.800

Sumber : Samsat Cinere

Tabel 10 menjelaskan realisasi denda PKB dengan jumlah kendaraan yang telat bayar berdasarkan denda pajaknya. Dari Tabel realisasi denda pajak tahun 2020 diatas dijelaskan denda pajak naik dan turun bersumber dari Samsat Cinere. Total denda nya berdasarkan dari PKB 1,2,3,4 dan 5 dari data lokal dan online kendaraan roda 2 dan roda 4.

### **Pembahasan**

Pemungutan Pajak Progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Depok Kantor Samsat Cinere sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak progresif. Hak dan kewajiban diantara Negara/Pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi yang sama kuatnya dalam menentukan sebagaimana pajak yang ditentukan berdasarkan undang-undang pajak progresif yang berlaku, yaitu berupa : siapa yang akan dikenakan, kapan akan dibayarkan, berapa jumlah pajak yang dibayar, sanksi apa yang dikenakan jika terlambat membayar. Dari hasil data penelitian yang sudah diolah sebagai bahan penelitian sudah dapat menjelaskan dari judul yang dibuat berdasarkan Target, Realisasi, BBNKB, PKB 1 sampai 5 dan denda PKB nya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Penelitian dan Analisa yang dilakukan atas Analisis Tarif Pengenaan Pajak Progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang berada Kota Depok, Cinere. Maka dapat

disimpulkan pengaruh positif Pajak Progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor membuat pendapatan pajak daerah khususnya di Cinere, Jawa Barat bertambah. Selain itu, untuk mengetahui peraturan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No 68 tahun 2011 tentang pajak daerah, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil uji penelitian pajak progresif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor.

Saran yang dapat dikemukakan oleh Penulis sebagai berikut :

1. Pihak SAMSAT Cinere, Jawa Barat harus membuat pemahaman tentang pajak progresif kepada wajib pajak kendaraan bermotor agar masyarakat dapat mengerti.
2. Pihak SAMSAT Cinere, Jawa Barat harus membuat pemahaman tentang penggunaan E-SAMSAT terhadap wajib pajak kendaraan bermotor agar mempermudah dan mempercepat pelayanan kondisi pandemi saat ini.
3. Sebaiknya pihak SAMSAT menginformasikan dasar pengenaan pajak progresif, cara penghitungannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Cinere, Jawa Barat.

## DAFTAR REFERENSI

- Adi, 2012 Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, 2016, Pajak Progresif.  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/8443/802>  
<http://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/7075>
- Irfan, 2016. Pengertian Pajak Progresif.
- Irwanto, Rudi 2015 Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Makassar, skripsi
- Khaddafi, Muammar dan Darwin, Annesa Dianty 2018. Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor THE FOUR MAXIM (studi kasus SAMSAT Kab. Pasamaan Barat Provinsi Sumatra Barat), jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan (edisi revisi 2016), Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018. Syarat Pemungutan Pajak.
- Nugraha, Agung Harist 2012. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (studi di kantor SAMSAT Malang Kota). Universitas Brawijaya, Malang.
- Perda Provinsi Jawa Barat No.68 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Priantara, Diaz 2017. Fungsi Pajak dan Teori Mengatur Pemungutan Pajak.
- Sari, Burhan & Putra, 2018. Pengertian Pajak Progresif dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.
- Sari, S.N, Burhan, I. & Putra. B.R.D 2018 Tinjauan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan
- Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D. Bandung. Alfabet.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo, 2020. Sistem Pemungutan Pajak.
-